



Peran Diplomasi Maritim Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia

Afifah Winda Ramadhani ^{1*}, Muhammad Imran Hanafi ², Mulawarman ³,
Dea Rizky Amalia ⁴

^{1,2} Universitas Hasanuddin, Indonesia

³ Universitas Andi Sudirman Watampone, Indonesia

⁴ Universitas Mulawarman, Indonesia

afifahwinda100@gmail.com ^{1*}, ihanafi174@gmail.com ², mulawarman602@gmail.com ³,
dearizkyamalia@fisip.unmul.ac.id ⁴

Alamat: Jl. Perintis Kemerdekaan No.KM.10, Tamalanrea Indah, Kec. Tamalanrea, Kota
Makassar, Sulawesi Selatan 90245

Korespondensi penulis: afifahwinda100@gmail.com

Abstract. *This paper discusses the role of Indonesia's maritime diplomacy in realizing its vision as the Global Maritime Fulcrum (Poros Maritim Dunia - PMD). Indonesia's maritime diplomacy focuses on strengthening maritime security, enhancing maritime infrastructure connectivity, sustainable marine resource management, and promoting maritime culture. Through active participation in international forums such as IORA and cooperation with G20 countries, Indonesia aims to strengthen its strategic position as a global maritime trade hub. This study highlights how maritime diplomacy supports the achievement of the five pillars of PMD, solidifying Indonesia's role in the Indo-Pacific region and enhancing the country's global influence.*

Keywords: *Diplomacy, Maritime, Security, Infrastructure*

Abstrak. Tulisan ini membahas peran diplomasi maritim Indonesia dalam mewujudkan visinya sebagai Poros Maritim Dunia (PMD). Diplomasi maritim Indonesia berfokus pada penguatan keamanan maritim, peningkatan konektivitas infrastruktur laut, pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan, serta promosi budaya maritim. Melalui partisipasi aktif di forum internasional seperti IORA dan kerja sama dengan negara-negara G20, Indonesia berusaha memperkuat posisi strategisnya sebagai pusat jalur perdagangan maritim global. Penelitian ini menyoroti bagaimana diplomasi maritim mendukung pencapaian lima pilar PMD, memperkuat peran Indonesia di kawasan Indo-Pasifik, dan meningkatkan pengaruh global negara tersebut.

Kata kunci: Diplomasi, Maritim, Keamanan, Infrastruktur

1. LATAR BELAKANG

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau memiliki posisi strategis di jantung kawasan Indo-Pasifik, wilayah yang menjadi pusat lalu lintas perdagangan maritim global dan persaingan geopolitik antarnegara besar. Indonesia memiliki wilayah laut yang luas dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Secara geografis, Indonesia terletak di daerah khatulistiwa, di antara dua benua yakni Asia dan Australia, serta diapit oleh dua samudra yaitu Pasifik dan Hindia. Sejak zaman kuno, posisi strategis Nusantara ini telah menjadi jalur lalu lintas laut yang menghubungkan benua timur dan barat (Jannah, 2020). Fakta ini mempertegas bahwa Indonesia layak disebut sebagai poros maritim dunia. Poros maritim dunia bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang tangguh, besar, dan sejahtera dengan mengembalikan identitasnya sebagai bangsa maritim, melindungi kepentingan dan keamanan maritim, serta memaksimalkan potensi maritim untuk mewujudkan pemerataan ekonomi di Indonesia.

Pemerintah Indonesia mengemukakan visinya untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia (PMD) pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Timur tahun 2014 di Myanmar. Sejak awal masa kepemimpinannya, pemerintah telah menetapkan lima pilar utama untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia (Indra dkk, 2024). Pertama, revitalisasi budaya maritim Indonesia. Sebagai negara dengan 17 ribu pulau, bangsa Indonesia perlu menyadari bahwa identitas, kemakmuran, dan masa depannya sangat bergantung pada bagaimana kita mengelola lautan. Pilar kedua adalah komitmen untuk melestarikan dan mengelola sumber daya laut dengan penekanan pada pembangunan kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan di mana nelayan menjadi pilar utamanya, "Kemakmuran maritim kami akan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat kami." Pilar ketiga adalah sebuah komitmen untuk mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim melalui pembangunan tol laut, pelabuhan, sistem logistik, serta industri perkapalan dan pariwisata laut. Pilar keempat adalah diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk berkolaborasi dalam bidang kelautan, "Kita harus bersama-sama mengatasi sumber konflik di laut, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perampokan, dan pencemaran laut," ujar Presiden Jokowi. Pilar kelima, sebagai negara yang terletak di pertemuan dua samudera, Indonesia memiliki kewajiban untuk mendorong perkembangan kekuatan pertahanan maritim, "Ini diperlukan tidak hanya untuk melindungi kedaulatan dan kekayaan maritim kami, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab kami dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim" (Setiawan, 2019).

Untuk merealisasikan visi besar ini, kekuatan militer atau pembangunan infrastruktur saja tidak cukup. Diplomasi maritim yang merupakan pilar ke empat dari visi PMD menjadi salah satu instrumen penting yang harus dioptimalkan untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di kawasan Indo-Pasifik. Melalui diplomasi maritim, Indonesia dapat mengoptimalkan proses realisasi visi besar Indonesia sebagai poros maritim dunia khususnya di kawasan Indo-Pasifik (Nainggolan, 2015). Diplomasi maritim merupakan salah satu bentuk diplomasi yang berfokus pada hubungan antarnegara di sektor maritim, mencakup pengelolaan sumber daya laut, keamanan maritim, perdagangan maritim, dan kerja sama di wilayah perairan (Hanggarini et al, 2022). Menurut Hadiningrat (2020), diplomasi maritim adalah upaya negara untuk mencapai tujuan politik dan strategis melalui interaksi di lingkungan maritim. Diplomasi ini melibatkan berbagai aktor termasuk negara, organisasi internasional, dan pihak swasta, dengan tujuan utama menjaga stabilitas dan keamanan wilayah perairan. Dengan demikian, diplomasi maritim Indonesia bertujuan

untuk menjaga stabilitas kawasan, sekaligus memperkuat posisi strategisnya sebagai poros maritim dunia. Pendekatan teori realisme dalam hubungan internasional relevan untuk memahami diplomasi maritim. Noer (2022) berpendapat bahwa realisme menekankan pentingnya kekuatan negara dan keamanan nasional dalam menjalankan kebijakan luar negeri. Dalam konteks ini, diplomasi maritim Indonesia dapat dipahami sebagai upaya untuk mengamankan wilayah kedaulatan maritim dari ancaman eksternal, seperti pencurian ikan (illegal fishing) dan pelanggaran batas laut dan memaksimalkan potensi ekonomi biru (blue economy) untuk mendukung pembangunan nasional.

Sebagai salah satu pilar dalam mencapai visi Poros Maritim Dunia, diplomasi maritim Indonesia telah sukses mencapai kesepakatan mengenai perjanjian batas maritim dengan beberapa negara terkait garis batas laut, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan Landas Kontinen. Dengan hadirnya visi PMD, diplomasi maritim semakin berfokus pada percepatan penyelesaian masalah perbatasan laut Indonesia dengan sepuluh negara tetangga, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam, India, Palau, Papua Nugini, Australia, dan Timor Leste (Hanggarini dkk, 2022). Praktik diplomasi maritim Indonesia dapat dilihat dari keikutsertaannya dalam berbagai forum internasional, seperti ASEAN dan *Indian Ocean Rim Association* (IORA). Dalam forum-forum ini, Indonesia berperan aktif dalam membangun kerangka kerja sama untuk menjaga keamanan maritim, menciptakan perlindungan terhadap lingkungan laut, dan menyelesaikan sengketa perbatasan dengan cara yang damai.

Sebelum memasuki pembahasan, penting untuk menegaskan bahwa analisis dalam jurnal ini akan difokuskan pada tiga rumusan masalah utama. Pertama, penulis akan menguraikan bagaimana peran diplomasi maritim Indonesia dalam mendorong kerja sama regional dan internasional untuk mewujudkan visi sebagai Poros Maritim Dunia. Pembahasan mencakup upaya Indonesia dalam memperkuat hubungan dengan negara-negara kawasan melalui mekanisme multilateral seperti ASEAN dan IORA, serta keterlibatan dalam forum internasional untuk mengatasi isu-isu maritim global, termasuk keamanan maritim, pengelolaan sumber daya laut, dan pemberantasan praktik illegal fishing. Selain itu, akan dianalisis tantangan yang dihadapi serta strategi yang diterapkan untuk meningkatkan posisi strategis Indonesia.

Kedua, penulis juga akan menguraikan peran diplomasi maritim Indonesia dalam menyelesaikan konflik perbatasan maritim dan sengketa laut dengan negara-negara tetangga. Fokusnya adalah pada strategi diplomasi yang mengedepankan pendekatan damai melalui dialog bilateral maupun mekanisme hukum internasional seperti UNCLOS 1982

untuk mencapai penyelesaian yang adil. Studi kasus, seperti negosiasi perbatasan dengan Singapore, Timor Timur, dan China akan digunakan untuk menunjukkan bagaimana Indonesia memanfaatkan diplomasi maritim sebagai alat untuk memperkuat kedaulatan wilayah sekaligus menjaga stabilitas regional. Pendekatan ini mencerminkan komitmen Indonesia terhadap kerja sama regional dan prinsip hukum internasional dalam menyelesaikan sengketa.

Ketiga, pembahasan juga akan mencakup bagaimana peran diplomasi maritim Indonesia dalam memperkuat pilar-pilar Poros Maritim Dunia seperti keamanan maritim, konektivitas infrastruktur laut, pengelolaan sumber daya laut, dan diplomasi maritim berbasis kerja sama regional dan internasional. Selain itu, pembahasan juga akan menyoroti upaya Indonesia untuk memposisikan diri sebagai pusat jalur perdagangan maritim internasional melalui peningkatan hubungan dengan mitra strategis, perjanjian perdagangan, dan keterlibatan dalam forum maritim global. Analisis ini akan memberikan gambaran peran diplomasi maritim dalam mendukung visi strategis Indonesia sebagai negara maritim yang berpengaruh di tingkat global.

2. KAJIAN TEORITIS

Diplomasi maritim Indonesia sebagai bagian dari upaya menjadikan negara ini sebagai poros maritim dunia memerlukan pemahaman mendalam terkait beberapa pendekatan teoritis dalam hubungan internasional dan kebijakan kelautan. Secara umum, diplomasi maritim dapat dipahami sebagai penggunaan kebijakan dan kekuatan maritim untuk mencapai tujuan diplomatik baik di tingkat bilateral, regional, maupun global (Kusumawardhana dkk, 2024). Dalam konteks Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar dengan lebih dari 17.000 pulau, keberadaan laut sebagai penghubung antar wilayah menjadi sangat sentral dalam kebijakan luar negeri negara ini (Jannah, 2020). Teori hubungan internasional yang dapat menjelaskan peran Indonesia adalah teori interdependensi yang menekankan bahwa negara-negara dunia semakin saling bergantung dalam menghadapi isu-isu bersama terutama yang berkaitan dengan perdagangan, keamanan, dan pengelolaan sumber daya alam. Indonesia yang terletak di antara dua samudra besar yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta memiliki posisi yang strategis dalam jalur pelayaran internasional, memiliki potensi besar untuk menjadi pusat kegiatan maritim global. Dalam kerangka ini, teori geopolitik dapat digunakan untuk memahami bagaimana posisi geografis Indonesia memberikan keuntungan strategis dalam menentukan arah kebijakan luar negeri yang berbasis maritim.

Penting juga untuk mencatat bahwa diplomasi maritim Indonesia bertujuan untuk memperkuat konektivitas antar negara di kawasan dan dunia. Indonesia, sebagai bagian dari poros maritim dunia berkomitmen untuk menjaga keberagaman ekosistem laut dan mempromosikan pengelolaan sumber daya laut yang berbasis pada prinsip kehati-hatian tanpa mengabaikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat yang bergantung pada laut. Dengan demikian, diplomasi maritim Indonesia menggabungkan berbagai teori hubungan internasional dari interdependensi hingga geopolitik yang saling berkaitan dalam menciptakan strategi kelautan yang tidak hanya berfokus pada keamanan, tetapi juga pada keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan atau literatur (library research), dari berbagai sumber tertulis tentang kebijakan dan teori diplomasi maritim. Bahan-bahan rujukan utama dikumpulkan dari berbagai buku, jurnal akademik, laporan kebijakan pemerintah, serta artikel ilmiah baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris yang relevan dengan topik ini. Literatur yang dibahas mencakup isu maritim, kebijakan luar negeri Indonesia, serta perjanjian-perjanjian internasional yang berkaitan dengan Indo-Pasifik.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Diplomasi Maritim Indonesia

Diplomasi maritim adalah konsep yang relatif baru dalam studi diplomasi dan berfungsi sebagai kerangka kebijakan untuk mengelola hubungan internasional di bidang maritim. Konsep ini dapat dilakukan melalui dua pendekatan utama. Pertama, diplomasi maritim yang melibatkan peran angkatan laut atau badan keamanan laut suatu negara untuk mendukung pencapaian tujuan kebijakan luar negeri, seperti membangun kepercayaan antarnegara (*confidence building measures*). Kedua, diplomasi maritim menggunakan pendekatan diplomasi tradisional yang dijalankan oleh diplomat untuk menyelesaikan masalah maritim, seperti sengketa batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) atau landas kontinen (Ni Putu, Mala, Khairur 2022). Salah satu kebijakan utama Indonesia adalah konsep *Global Maritime Fulcrum (GMF)*, yang diperkenalkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai visi strategis untuk memanfaatkan potensi besar sektor maritim Indonesia demi pembangunan jangka panjang. Visi ini pertama kali diumumkan oleh Presiden Jokowi tak lama setelah ia dilantik pada tahun 2014. Poros Maritim Dunia merupakan pendekatan

menyeluruh yang mengintegrasikan berbagai aspek, termasuk ekonomi, geopolitik, geostrategis, dan keamanan. Tujuannya adalah menjadikan Indonesia sebagai kekuatan maritim utama di tingkat global, sekaligus memanfaatkan posisi strategis negara dalam jalur perdagangan internasional untuk meningkatkan kesejahteraan nasional dan pengaruh internasional (Suspada, Banju, Budi, Lukman 2024).

Diplomasi maritim Indonesia memainkan peran kunci dalam menangani dan menyelesaikan konflik perbatasan maritim serta sengketa laut dengan negara-negara tetangga. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan perairan yang strategis di kawasan Asia Tenggara, Indonesia memiliki tantangan besar dalam memastikan batas-batas maritimnya diakui oleh negara-negara di sekitarnya. Untuk mencapai hal ini, Indonesia menggunakan pendekatan diplomatik yang mengedepankan dialog, negosiasi, dan kerangka hukum internasional sebagai dasar untuk mencapai solusi damai atas berbagai sengketa.

Pendekatan Indonesia dalam menyelesaikan sengketa perbatasan laut umumnya didasarkan pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 yang memberikan pedoman bagi penentuan batas laut suatu negara, termasuk batas laut teritorial, zona ekonomi eksklusif (ZEE), dan landas kontinen. Dengan menggunakan kerangka hukum ini, Indonesia berupaya memastikan bahwa sengketa perbatasan dapat diselesaikan secara adil dan sesuai dengan hukum internasional. Pada tahun 2016, China mengeluarkan nota diplomatik untuk secara resmi mengklaim perairan Natuna, kemudian hal tersebut dibantah keras oleh Indonesia. Selama periode 2017-2019, sering terjadi insiden pengusiran kapal antara penjaga pantai Indonesia dengan kapal pengawas China hingga ketegangan meningkat lagi pada akhir 2019. Sebanyak 63 kapal nelayan China yang didampingi oleh kapal-kapal *Coast Guard China* memasuki wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di sekitar Natuna. Indonesia menuntut hak kedaulatan dan mengusir kapal-kapal China tersebut karena dianggap melanggar wilayah NKRI. China menyatakan bahwa mereka memiliki hak waris terhadap perairan Natuna dengan alasan sejarah masa lalu. Namun, Indonesia kembali menolak klaim sepihak China tersebut dengan merujuk pada UNCLOS 1982 sebagai dasar dalam penetapan batas laut internasional (Niko dkk, 2024).

Indonesia juga menggunakan diplomasi maritim melalui mekanisme bilateral dan multilateral dengan negara-negara tetangga. Pada level bilateral, Indonesia melakukan pertemuan dan pembicaraan rutin dengan negara-negara yang memiliki perbatasan laut yang bersinggungan seperti Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Tujuan dari diplomasi ini adalah mencapai kesepakatan yang jelas tentang batas-batas wilayah laut sehingga masing-masing

negara dapat mengelola sumber daya laut mereka tanpa konflik. Selain itu, Indonesia telah berhasil mencapai kesepakatan dengan beberapa negara melalui perundingan perbatasan, menunjukkan komitmen Indonesia untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan melalui proses diplomasi yang berkelanjutan. Di tingkat multilateral, Indonesia aktif dalam berbagai forum regional seperti ASEAN dan ARF yang memungkinkan dialog konstruktif dengan negara-negara tetangga mengenai isu-isu keamanan maritim (Annisa, 2024). Melalui forum ini, Indonesia tidak hanya memperkuat hubungan diplomatik tetapi juga mendorong terciptanya norma dan standar regional terkait keamanan dan stabilitas di laut. Hal ini penting untuk mencegah potensi konflik di wilayah yang menjadi sengketa seperti Laut China Selatan, di mana kepentingan berbagai negara saling bersinggungan. Indonesia berupaya membangun konsensus regional mengenai pendekatan yang damai dalam menangani sengketa dan mendorong kepatuhan pada hukum internasional untuk menjaga stabilitas kawasan.

Selain upaya hukum dan diplomasi bilateral, Indonesia juga melakukan patroli maritim bersama dengan negara-negara tetangga untuk mengurangi ketegangan di wilayah yang rentan konflik serta untuk memastikan penegakan hukum di perbatasan laut. Patroli bersama ini tidak hanya meningkatkan keamanan di perairan perbatasan tetapi juga memperkuat koordinasi operasional dan rasa saling percaya antara negara-negara yang terlibat (Gusty, 2022). Dengan adanya patroli bersama, Indonesia dan negara tetangga dapat mengurangi insiden pelanggaran wilayah dan mengatasi masalah perikanan ilegal yang sering menjadi pemicu ketegangan.

Melalui pendekatan diplomasi maritim yang holistik dan berbasis hukum, Indonesia berusaha mengukuhkan posisinya sebagai kekuatan maritim yang mengedepankan perdamaian dan stabilitas. Diplomasi ini tidak hanya membantu Indonesia mengatasi konflik perbatasan secara damai, tetapi juga memperkuat peran Indonesia sebagai pemimpin maritim di kawasan Asia Tenggara yang berkomitmen pada kerja sama regional dan kepatuhan terhadap hukum internasional. Upaya diplomasi yang konsisten dan mengedepankan dialog damai ini mendukung visi Indonesia untuk menjadi poros maritim dunia yang tidak hanya kuat dalam ekonomi dan keamanan maritim, tetapi juga dihormati dalam penyelesaian sengketa secara damai.

Kerja Sama Regional

Indonesia aktif terlibat dalam berbagai kerja sama regional yang bertujuan untuk meningkatkan stabilitas maritim dan mengatasi tantangan bersama di kawasan. Beberapa inisiatif dan peluang kerja sama regional yang dijalankan oleh Indonesia adalah:

- a. *ASEAN (Association of Southeast Asian Nations)*: Indonesia merupakan salah satu pendiri ASEAN dan berperan penting dalam kerjasama maritim di kawasan Asia Tenggara. Dalam konteks ini, Indonesia menginisiasi berbagai forum dan pertemuan seperti *ASEAN Maritime Forum (AMF)* yang bertujuan untuk mendiskusikan isu-isu maritim termasuk keamanan perairan, penanggulangan pencurian ikan, dan mitigasi bencana. Indonesia memainkan peran penting dalam pembentukan *ASEAN Coast Guard Forum (ACGF)* yang lahir dari kesadaran akan perlunya kerja sama regional dalam menjaga keamanan maritim. Gagasan pembentukan forum ini pertama kali muncul pada tahun 2014 dalam AMF ke-5. Sejak saat itu, berbagai kelompok kerja dan pertemuan ahli telah dilakukan untuk merealisasikan ide tersebut. Pada November 2022, Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan pertama ACGF yang dihadiri hampir seluruh negara anggota ASEAN. Dengan kepemimpinan Indonesia, ASEAN berpotensi memperkuat dan mengembangkan peran ACGF lebih jauh. Upaya ini tidak hanya mempererat solidaritas negara-negara ASEAN, tetapi juga mendukung penguatan sentralitas ASEAN di kawasan (Abel 2023).
- b. *Indian Ocean Rim Association (IORA)*: Sebagai anggota IORA, Indonesia berpartisipasi aktif dalam dialog dan kerjasama maritim di kawasan Samudera Hindia. IORA fokus pada isu-isu seperti perdagangan, investasi, dan keamanan maritim. Indonesia berupaya untuk memperkuat kerja sama dalam bidang pelatihan maritim, pengembangan kapasitas, dan penegakan hukum di laut. Sebagai ketua dalam IORA, Indonesia memanfaatkan posisi ini sebagai kesempatan strategis untuk mengoptimalkan kepentingan nasionalnya. Terdapat hubungan yang erat antara lima pilar dari PMD yang dicanangkan oleh pemerintah dan enam prioritas yang dimiliki oleh IORA. Hal ini menjadikan IORA sebuah platform yang strategis untuk mendukung tercapainya visi PMD. Melalui diplomasi maritim, Indonesia dapat memberikan kontribusi besar dalam pengembangan IORA, mengingat ada kesamaan prioritas antara kedua hal tersebut yang mencakup tiga aspek utama: politik dan keamanan maritim, ekonomi, serta sosial-budaya (Nisa, 2020). Sinergi antara pilar-pilar Poros Maritim Dunia dan prioritas IORA ini saling memperkuat, memberikan dampak positif di masing-masing bidang. Indonesia menjadi salah satu inisiator utama untuk mempromosikan konsep ekonomi biru. Gagasan ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya laut secara berkelanjutan sambil menjaga keseimbangan ekosistem laut. Melalui IORA Blue Economy Declaration, Indonesia berhasil mendorong negara-negara anggota untuk berkomitmen pada praktik-praktik ekonomi berbasis

keberlanjutan. Deklarasi ini telah diimplementasikan melalui berbagai proyek seperti pengelolaan perikanan yang ramah lingkungan dan pengurangan limbah plastik di laut yang menunjukkan keberhasilan usulan Indonesia dalam mendorong agenda ini (Nisa, 2020). Indonesia terus berjuang untuk mewujudkan PMD sesuai dengan kebijakan yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi.

- c. **Bilateral Agreements:** Indonesia juga menjalin kerja sama bilateral dengan negara-negara tetangga untuk menangani isu-isu maritim. Penyelesaian isu-isu yang melibatkan beberapa negara dapat mengurangi potensi ketegangan dan meningkatkan kerja sama dalam menghadapi ancaman bersama, seperti terorisme, kejahatan lintas negara, dan keamanan maritim. Salah satu contoh utama adalah patroli terkoordinasi di kawasan perbatasan yang dikenal sebagai Trilateral Maritime Patrol Indomalphi melibatkan Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Patroli ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan stabilitas serta mengatasiterjadinya insiden perompakan dan penyelundupan di Laut Sulu dan Laut Sulawesi yang merupakan jalur strategis bagi perdagangan dan kegiatan ekonomi. Dalam kerja sama ini, ketiga negara berbagi informasi, melakukan patroli bersama, dan mendirikan pos keamanan terpadu di wilayah perbatasan (Octav, dkk 2020). Dengan tercapainya kesepakatan yang konstruktif, stabilitas regional dapat terjaga dan kerja sama trilateral akan semakin kuat. Indonesia juga menjalin kerja sama dengan Malaysia dan Singapura yaitu *Malacca Strait Patrol (MSP)*, Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran terpenting dan tersibuk di dunia sehingga keamanan di wilayah ini menjadi prioritas untuk mencegah kejahatan maritim seperti perompakan dan penyelundupan (Lydia, Anggun 2019). Dengan terlibat dalam patroli terkoordinasi ini, Indonesia menunjukkan komitmennya untuk menjaga stabilitas di jalur pelayaran penting sehingga memperkuat posisinya sebagai penjaga keamanan di kawasan maritim Asia Tenggara.
- d. **Forum maritim Indonesia-Malaysia :** Forum ini merupakan wadah kerja sama bilateral yang memperkuat hubungan kedua negara dalam bidang kelautan dengan fokus pada pengelolaan perbatasan, keamanan maritim, dan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan. Forum ini juga membahas berbagai isu lintas batasseperti penegakan hukum maritim, pencegahan *illegal fishing*, serta pengamanan jalur pelayaran yang ramai oleh kapal perdagangan internasional. Keamanan di jalur-jalur perairan strategis, seperti Selat Malaka, menjadi prioritas bagi Indonesia karena kawasan ini adalah jalur perdagangan utama yang menghubungkan Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik (Rijal 2018). Dengan bekerja sama dengan Malaysia dalam melindungi jalur ini,

Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai penjaga jalur pelayaran yang aman dan stabil bagi komunitas internasional. Selain pada aspek keamanan, forum ini juga menjadi platform bagi Indonesia untuk mengembangkan kerja sama di bidang ekonomi maritim misalnya dalam pengelolaan perikanan dan kawasan konservasi. Dengan adanya kesepakatan dalam pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan, Indonesia dan Malaysia dapat mendorong praktik-praktik ekonomi biru yang berkelanjutan di kawasan yang tidak hanya melindungi ekosistem laut, tetapi juga mendorong pembangunan ekonomi bagi masyarakat pesisir (Oktavian, 2023). Keterlibatan aktif Indonesia dalam forum ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam memajukan kerja sama maritim yang tidak hanya menguntungkan kedua negara tetapi juga berdampak positif bagi stabilitas dan kesejahteraan regional.

- e. Kerja sama bilateral Indonesia-Timor Leste. Kerja sama bilateral antara Indonesia dan Timor-Leste telah berkembang sejak kemerdekaan Timor-Leste pada tahun 2002. Sebagai dua negara yang bertetangga dekat hubungan ini didasarkan pada prinsip saling menghormati, kerja sama yang menguntungkan, serta semangat untuk menciptakan stabilitas dan pembangunan di kawasan (Monteiro, 2019). Penyelesaian perbatasan maritim menjadi salah satu prioritas utama dalam hubungan kedua negara. Proses negosiasi mengenai batas laut telah berlangsung selama bertahun-tahun, dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan sesuai dengan hukum internasional khususnya Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS). Batas maritim yang jelas diperlukan untuk mencegah konflik dan memastikan pemanfaatan sumber daya laut yang saling menguntungkan. Bilateral agreement yang efektif juga memastikan pengelolaan sumber daya bersama yang lebih terkoordinasi, mengurangi ketegangan, dan meningkatkan kepercayaan antarnegara di kawasan. Salah satu titik fokus adalah pengelolaan wilayah perairan di sekitar Selat Ombai dan Timor Gap (Soares, 2024). Kedua negara berkolaborasi untuk memastikan pengelolaan sumber daya laut dilakukan secara berkelanjutan terkhusus di kawasan *The Indonesian Seas Large Marine Ecosystem (ISLME)*. Dalam beberapa kesempatan, Indonesia berbagi keahlian terkait teknik perikanan yang ramah lingkungan dan pengembangan sektor perikanan. Timor-Leste juga mendapatkan bantuan teknis dari Indonesia untuk meningkatkan kapasitasnya dalam mengelola sumber daya laut termasuk dalam pembentukan kerangka kebijakan kelautan. Dengan mempererat hubungan bilateral, Indonesia semakin mendekati realisasi visi Poros Maritim Dunia. Ini menunjukkan bahwa

diplomasi maritim yang efektif dapat membawa dampak positif yang nyata bagi kepentingan nasional Indonesia di kancah global. Penyelesaian bilateral agreement sangat penting untuk meminimalisir dampak negatif terhadap keamanan kawasan. Melalui kesepakatan yang jelas, negara-negara dapat mengurangi potensi konflik dan memperkuat kerja sama dalam menjaga stabilitas regional.

Melalui berbagai inisiatif dan forum kerja samaregional, Indonesia tidak hanya berupaya menjaga kedaulatan dan keamanan maritimnya tetapi juga berkontribusi pada penyelesaian masalah maritim. Kerja sama ini mendukung visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dan membantu menciptakan lingkungan maritim yang aman dan berkelanjutan.

Kerja Sama Internasional

Dalam ranah internasional, Indonesia berperan aktif melalui berbagai kerja sama internasional yang bertujuan untuk meningkatkan stabilitas maritim dan mengatasi tantangan bersama di kawasan. Beberapa inisiatif dan peluang kerja sama internasional yang dijalankan oleh Indonesia adalah:

- a. *International Maritime Organization (IMO)*: Keterlibatan Indonesia dalam *International Maritime Organization (IMO)* memperkuat visi Poros Maritim Dunia dengan mendorong kerja sama internasional dan peningkatan peran strategis Indonesia dalam tata kelola maritim global. IMO adalah organisasi internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertanggung jawab mengatur keselamatan dan keamanan pelayaran serta mendorong perlindungan lingkungan maritim secara global. Melalui keterlibatan dalam IMO, Indonesia memiliki akses ke standar internasional, regulasi, dan praktik terbaik yang sangat relevan dalam upayanya memperkuat sektor maritim (Kementerian Perhubungan RI, 2017). Sebagai anggota IMO, Indonesia berpartisipasi dalam perumusan berbagai konvensi internasional, seperti Konvensi SOLAS (*Safety of Life at Sea*) dan MARPOL (*International Convention for the Prevention of Pollution from Ships*). Penerapan standar keselamatan dan perlindungan lingkungan yang diatur dalam konvensi-konvensi ini memungkinkan Indonesia untuk menjaga keamanan pelayaran di perairannya dan meminimalkan dampak aktivitas maritim terhadap lingkungan (Sagala, 2021). Selain itu, keterlibatan dalam IMO memberi Indonesia suara dalam perumusan kebijakan maritim global yang penting dalam mewujudkan visinya sebagai poros maritim dunia. Dengan ikut terlibat dalam diskusi dan negosiasi di IMO, Indonesia dapat menyuarakan pandangannya dan memperjuangkan kebijakan yang sejalan dengan kepentingannya serta berkontribusi

dalam mengarahkan arah kebijakan maritim global yang mendukung stabilitas dan pertumbuhan di kawasan Indo-Pasifik. Ini tidak hanya memperkuat keamanan dan stabilitas di perairan Indonesia tetapi juga menciptakan peluang bagi Indonesia untuk berperan sebagai pusat aktivitas maritim di kawasan sejalan dengan ambisinya menjadi poros maritim dunia.

- b. *South China Sea Framework*: Framework Kerja Sama Laut China Selatan yang disepakati antara ASEAN dan Tiongkok bertujuan untuk menciptakan kerangka aturan dalam menangani perselisihan di kawasan Laut China Selatan (Sarah dkk 2023). Meskipun Indonesia bukan pihak dalam *sengketa* di Laut Cina Selatan negara ini berperan sebagai mediator dalam mendorong dialog antara negara-negara yang terlibat. Keterlibatan Indonesia dalam *South China Sea Framework* mendukung visi Poros Maritim Dunia dengan memperkuat pilar diplomasi maritim melalui upaya menjaga stabilitas kawasan, mempromosikan kerja sama regional, dan memastikan kepatuhan terhadap hukum laut internasional. Indonesia berusaha untuk menciptakan stabilitas di kawasan dengan mendorong penyelesaian sengketa secara damai dan berdasarkan hukum internasional seperti UNCLOS, serta mendorong penerapan *Code of Conduct (CoC)* di Laut China Selatan sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas dan keamanan maritim (Yuli dkk 2021). Kerangka kerja ini memiliki potensi besar dalam mendukung ambisi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Melalui dukungannya terhadap CoC, Indonesia memperlihatkan komitmennya untuk menjaga keamanan dan stabilitas di jalur perdagangan maritim yang sangat penting bagi ekonomi global. Langkah ini sejalan dengan visi Indonesia sebagai pusat maritim dunia yang mampu menjembatani kerja sama lintas negara serta berkontribusi dalam menjaga arus perdagangan bebas dan keamanan maritim internasional. Dengan menjadi aktor yang mampu menjalin hubungan baik dengan negara-negara ASEAN maupun Tiongkok, Indonesia berperan dalam memperkuat kohesi regional. Keterlibatan ini membuka peluang bagi Indonesia untuk memperluas jaringan kerjasama di bidang maritim dengan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik sehingga mendukung terciptanya poros maritim yang solid dan berpengaruh di panggung internasional.
- c. *ASEAN Regional Forum (ARF)* : Keterlibatan Indonesia dalam forum ini memperkuat diplomasi maritimnya melalui dialog yang bertujuan meningkatkan transparansi dan membangun kepercayaan antarnegara. ARF sejalan dengan pilar-pilar Poros Maritim Dunia karena berfungsi sebagai platform dialog multilateral yang memperkuat diplomasi maritim, salah satu pilar *utama* Poros Maritim Dunia. Melalui ARF,

Indonesia dapat mendorong komitmen negara-negara anggota untuk menjaga perairan yang aman dan damai di kawasan, sebuah prinsip yang mendukung visinya sebagai pusat lalu lintas dan aktivitas maritim di Asia-Pasifik. ARF berfungsi sebagai tempat bagi Indonesia untuk mempromosikan konsep-konsep maritim yang inovatif dan memperjuangkan kebijakan maritim yang mendukung keberlanjutan (Kementerian Luar Negeri, 2019). Keikutsertaan aktif Indonesia dalam ARF dapat membangun hubungan internasional yang kuat, meningkatkan kapasitas maritimnya, serta memperkuat peran diplomatiknya di kawasan Asia-Pasifik. Dengan memanfaatkan ARF sebagai platform untuk mendorong stabilitas, keamanan, dan keberlanjutan di laut, Indonesia mengambil langkah-langkah signifikan menuju pencapaian visi besar sebagai poros maritim dunia.

- d. Kerja Sama dengan Negara-Negara G20: G20 mendukung pilar-pilar Poros Maritim Dunia, khususnya dalam penguatan ekonomi kelautan dengan mendorong kolaborasi global untuk menjaga laut sebagai jalur perdagangan internasional yang aman dan efisien. Dalam konteks ini, G20 memfasilitasi diskusi mengenai pengelolaan rantai pasok maritim yang berkelanjutan serta pengembangan *infrastruktur* pelabuhan dan konektivitas maritim. Dukungan ini sejalan dengan visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi dan keberlanjutan sumber daya laut. Indonesia dapat menarik investasi dari negara-negara maju untuk membangun dan memperluas infrastruktur pelabuhan, jalur pelayaran, dan fasilitas logistik lainnya. Infrastruktur maritim yang kuat mendorong Indonesia untuk menjadi pusat lalu lintas laut yang penting antara Samudra Hindia dan Pasifik. Selama Presidensi G20 Indonesia pada tahun 2022, Indonesia mengajukan pentingnya transisi ekonomi biru sebagai solusi untuk mengatasi tantangan perubahan iklim dan ketahanan pangan. Gagasan ini diterima dengan baik oleh negara-negara anggota, terbukti dengan adanya komitmen bersama dalam mendukung proyek ekonomi biru dan inovasi di sektor kelautan. Dalam forum ini, Indonesia dapat memperkuat kerja sama dengan negara-negara yang memiliki kepentingan di kawasan maritim Indo-Pasifik seperti Amerika Serikat, China, dan Australia. Hubungan diplomatik yang kuat dengan negara-negara ini mempermudah Indonesia untuk mendorong terciptanya kawasan maritim yang aman dan stabil yang merupakan elemen kunci dalam visinya sebagai poros maritim dunia.

Melalui berbagai inisiatif dan forum kerja samainternasional, Indonesia tidak hanya berupaya menjaga kedaulatan dan keamanan maritimnya tetapi juga berkontribusi pada

penyelesaian masalah maritim secara internasional. Kerja sama ini mendukung visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dan membantu menciptakan lingkungan maritim yang tentu saja aman dan menguntungkan.

Diplomasi Maritim dan Penguatan Pilar-Pilar PMD

Visi PMD mencakup lima pilar utama yaitu keamanan maritim, konektivitas infrastruktur laut, pengelolaan sumber daya laut, pengembangan budaya maritim, serta diplomasi maritim. Kerjasama internasional dan regional juga tidak lepas dari upaya mencapai kelima pilar tersebut. Melalui peran aktif dalam diplomasi maritim, Indonesia memperkuat posisinya dan memperluas pengaruhnya di tingkat global. Berikut adalah pembahasan peran diplomasi maritim Indonesia dalam memperkuat pilar-pilar tersebut.

Diplomasi maritim penting dalam mewujudkan pengembangan budaya maritim. Pilar ini bertujuan untuk menghidupkan kembali identitas Indonesia sebagai negara maritim dengan mengedepankan nilai-nilai budaya laut yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Diplomasi maritim, melalui berbagai kerja sama internasional dan kegiatan budaya menjadi alat yang efektif untuk memperkuat kesadaran maritim baik di tingkat nasional maupun global. Indonesia sering menggunakan diplomasi kebudayaan sebagai bagian dari diplomasi maritim untuk memperkenalkan tradisi maritim lokal seperti teknologi perahu tradisional Pinisi dari Sulawesi Selatan. UNESCO telah mengakui perahu Pinisi sebagai Warisan Budaya Tak Benda (Intangible Cultural of Humanity), berkat upaya diplomasi budaya Indonesia. Pengakuan ini tidak hanya memperkuat identitas maritim Indonesia tetapi juga mendorong kebanggaan nasional dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya budaya laut (Setyadi, 2018). Melalui kerja sama dengan organisasi internasional seperti UNESCO atau IMO Indonesia menyelenggarakan konferensi, pameran, dan festival yang menampilkan budaya maritim. Kegiatan ini memperkuat hubungan antarnegara sekaligus menanamkan kesadaran di kalangan masyarakat internasional akan pentingnya warisan budaya maritim (Kementerian Luar Negeri, 2024). Diplomasi maritim menjadi instrumen strategis untuk mengintegrasikan budaya maritim ke dalam pembangunan nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat budaya maritim dunia.

Sebagai negara maritim, pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan adalah sebuah prioritas. Dalam konteks ini, Indonesia berpartisipasi aktif di IORA untuk mempromosikan ekonomi biru dan melindungi ekosistem laut. Pada pertemuan tingkat tinggi IORA, Indonesia menjadi salah satu negara yang mendorong disahkannya Deklarasi Ekonomi Biru. Deklarasi ini bertujuan memperkuat kerja sama negara-negara anggota

dalam mengembangkan sektor maritim yang berkelanjutan, termasuk perikanan, energi laut, dan pariwisata bahari (Nisa, 2020). Selain itu, kerja sama bilateral dengan negara-negara tetangga seperti Forum Maritim Indonesia-Malaysia, menekankan pada konservasi dan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan. Melalui perjanjian internasional, Indonesia juga mendukung penegakan hukum terhadap praktik ilegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing yang merugikan negara dan ekosistem laut. Langkah-langkah ini mempertegas Indonesia sebagai negara maritim yang tidak hanya mengandalkan potensi geografisnya, tetapi juga mengoptimalkan pengaruhnya melalui diplomasi dan kerja sama internasional.

Konektivitas Infrastruktur Laut, pilar ini menyoroti pentingnya pengembangan infrastruktur laut sebagai pendukung jalur perdagangan internasional. Melalui kerja sama dengan negara-negara G20 dan forum internasional lainnya, Indonesia menarik investasi asing untuk meningkatkan kualitas pelabuhan, jalur pelayaran, dan infrastruktur logistik. Negara-negara G20, seperti Jepang dan China, telah berinvestasi dalam pembangunan pelabuhan strategis di Indonesia, seperti Pelabuhan Patimban dan Pelabuhan Kuala Tanjung. Infrastruktur ini mendukung peningkatan arus perdagangan internasional melalui jalur laut, memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat jalur perdagangan global (Sitti dkk, 2022). Upaya ini bertujuan menjadikan Indonesia sebagai penghubung utama antara Samudra Hindia dan Pasifik. Pembangunan tol laut yang berfungsi untuk mengurangi disparitas logistik antarwilayah juga merupakan bagian penting dari strategi ini. Diplomasi maritim Indonesia berperan dalam memastikan bahwa negara-negara mitra turut berkontribusi dalam proyek-proyek ini melalui perjanjian perdagangan dan investasi.

Dalam mewujudkan poros maritim dunia, Indonesia fokus pada penguatan sebagai negara maritim yang mampu menjalin kerja sama internasional guna mendukung kerjasama sektor maritim. Pilar ini berfokus pada penguatan peran Indonesia sebagai negara maritim yang mampu menjalin kerja sama internasional untuk memastikan keamanan, keberlanjutan dan kemajuan sektor maritim. Indonesia secara aktif menggunakan diplomasi maritim untuk menyelesaikan sengketa perbatasan maritim seperti dalam kasus penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan Filipina. Kesepakatan yang dicapai pada 2014 setelah negosiasi panjang menunjukkan keberhasilan Indonesia dalam menggunakan diplomasi untuk menciptakan stabilitas di kawasan. Hal ini tidak hanya mendukung kedaulatan maritim Indonesia tetapi juga mencerminkan kepemimpinan negara dalam menyelesaikan konflik secara damai (Kementerian Pertahanan, 2017). Di IORA, Indonesia mempromosikan konsep ekonomi biru untuk memaksimalkan potensi laut secara

berkelanjutan. Partisipasi ini memperlihatkan bagaimana diplomasi maritim dapat memperkuat pengaruh Indonesia di tingkat global. Upaya perwujudan diplomasi maritim sebagai pilar Poros Maritim Dunia terlihat dari langkah konkret Indonesia dalam menyelesaikan sengketa perbatasan, memimpin forum regional, melawan kejahatan maritim, dan memperkuat infrastruktur maritim melalui kerja sama internasional. Dengan strategi ini, diplomasi maritim tidak hanya mendukung kedaulatan dan keamanan maritim Indonesia tetapi juga memperkokoh posisinya sebagai negara maritim terkemuka di dunia.

Dalam mengembangkan keamanan maritim Indonesia memimpin berbagai inisiatif guna meningkatkan stabilitas di kawasan, seperti patroli terkoordinasi *Trilateral Maritime Patrol (Indomalphi)* dengan Malaysia dan Filipina untuk mencegah perompakan dan penyelundupan di Laut Sulu dan Laut Sulawesi. Indonesia juga aktif dalam AMF dan ACGF yang bertujuan memperkuat kerja sama keamanan maritim di Asia Tenggara (Abel, 2023). Melalui diplomasi maritim, Indonesia berperan sebagai mediator untuk menyelesaikan konflik di Laut Cina Selatan dengan mendorong penerapan *Code of Conduct (CoC)* dan mendukung penyelesaian sengketa berdasarkan hukum internasional, seperti UNCLOS (Yuli dkk, 2021). Indonesia juga menjalin kerja sama bilateral seperti dengan Amerika Serikat melalui BAKAMLA dan *US Coast Guard* yang merupakan langkah konkret dalam memperkuat kemitraan bilateral di bidang maritim antara Indonesia dan Amerika Serikat. Kerja sama ini bertujuan untuk menjaga kedaulatan wilayah laut, memastikan penegakan hukum internasional, serta meningkatkan keamanan dan stabilitas di kawasan maritim (Iswardhana, 2021). Hubungan ini mencerminkan komitmen kedua negara untuk saling mendukung dalam mengatasi tantangan maritim global, seperti perdagangan ilegal, kejahatan lintas batas, dan ancaman keamanan di perairan strategis. Kerja sama ini sangat penting bagi Indonesia mengingat posisinya sebagai negara kepulauan dengan perairan yang luas dan tantangan keamanan maritim yang kompleks, kolaborasi dengan USCG memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk memperkuat kemampuan teknis dan operasional BAKAMLA RI, sekaligus memperkuat diplomasi maritimnya. Namun, agar kerja sama ini berkelanjutan dan mencapai apa yang diharapkan Indonesia perlu memastikan bahwa hubungan tersebut tetap didasarkan pada prinsip saling menghormati kedaulatan dan kepentingan nasional masing-masing negara. Stabilitas maritim yang terjaga sangat penting untuk mendukung visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Diplomasi maritim mendukung pengembangan infrastruktur pelabuhan yang lebih baik di Indonesia, seperti pembangunan dan modernisasi pelabuhan-pelabuhan utama di

seluruh nusantara. Hal ini memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat logistik dan perdagangan di Asia Tenggara, yang tidak hanya meningkatkan kapasitas ekonomi domestik tetapi juga memperkuat konektivitas dengan pasar global. Selain itu, Indonesia juga aktif dalam memperjuangkan kebijakan maritim yang mendukung keberlanjutan, seperti perlindungan lingkungan laut dan pengelolaan sumber daya perikanan yang bertanggung jawab yang memperkuat kredibilitas Indonesia sebagai negara yang mengedepankan pembangunan maritim yang berkelanjutan. Dalam kerangka multilateral, Indonesia juga memperkuat posisinya melalui partisipasi dalam organisasi regional dan internasional yang berfokus pada masalah maritim, seperti ASEAN, APEC, dan Organisasi Maritim Internasional (IMO). Melalui forum-forum ini, Indonesia dapat mempromosikan kebijakan maritim yang inklusif serta menciptakan norma dan standar internasional yang menguntungkan bagi perdagangan bebas dan keamanan maritim (Kementerian Perhubungan, 2017). Ini semua sejalan dengan visi Indonesia untuk menjadi poros maritim dunia yang tidak hanya mengedepankan kekuatan ekonomi, tetapi juga stabilitas politik dan diplomasi yang memperkuat posisi negara di peta perdagangan global. Melalui diplomasi yang efektif, Indonesia dapat memaksimalkan potensi geografis dan ekonominya, menjaga jalur pelayaran internasional tetap aman, serta mendorong kerjasama regional dan global yang memperkuat peran Indonesia sebagai kekuatan maritim yang berpengaruh di dunia.

Diplomasi maritim mendukung pencapaian visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Melalui penguatan keamanan maritim, pengembangan infrastruktur laut, pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, dan kerja sama internasional, Indonesia berupaya menjadi pusat jalur perdagangan maritim di kawasan. Upaya ini tidak hanya meningkatkan posisi strategis Indonesia, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan lingkungan maritim global yang aman dan berkelanjutan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Diplomasi maritim Indonesia memiliki peran strategis dalam mendukung visi Poros Maritim Dunia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia menggunakan diplomasi maritim untuk memperkuat posisi strategisnya di kawasan Indo-Pasifik melalui berbagai pendekatan, termasuk penguatan keamanan maritim, pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan, pembangunan konektivitas infrastruktur laut, dan promosi budaya maritim. Pendekatan diplomasi ini terlihat dari partisipasi aktif Indonesia dalam forum regional dan internasional, seperti ASEAN, IORA, dan IMO yang digunakan untuk memperkuat kerja sama, menyelesaikan konflik maritim, dan mendorong keberlanjutan.

Melalui diplomasi yang mengedepankan hukum internasional dan kerja sama multilateral, Indonesia mampu memaksimalkan posisi strategisnya sebagai pusat jalur perdagangan global, sekaligus menjaga stabilitas dan keamanan kawasan. Selain itu, diplomasi maritim juga memainkan peran penting dalam membangun konektivitas infrastruktur laut, seperti proyek tol laut dan pengembangan pelabuhan utama, yang memperkuat logistik dan perdagangan internasional. Dengan pendekatan yang inklusif dan berorientasi pada pembangunan keberlanjutan, Indonesia berhasil memperkokoh perannya sebagai pemimpin maritim di kawasan sekaligus berkontribusi pada lingkungan maritim global yang aman dan stabil. Dengan strategi diplomasi maritim yang komprehensif, Indonesia semakin mendekati realisasi visinya sebagai Poros Maritim Dunia, menjadikan sektor maritim sebagai pilar utama pembangunan ekonomi, politik, dan budaya nasional.

DAFTAR REFERENSI

- Chairun Nisa, A. (2020). **Diplomasi maritim Indonesia dalam Indian Ocean Rim Association (IORA)**. *Journal of Government Science*, 1(2).
- Costa, D. (2022). Mitra Asia Tenggara meningkatkan patroli maritim trilateral. *IP DefenseForum*. Diakses dari <https://ipdefenseforum.com/id/2022/06/mitra-asia-tenggara-meningkatkan-patroli-maritim-trilateral/>.
- Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. (2017). Menhub: Sebagai poros maritim dunia, Indonesia berperan aktif dalam kebijakan IMO. Diakses dari <https://hubla.dephub.go.id/home/post/read/5429/menhub-sebagai-poros-maritim-dunia-indonesia-berperan-aktif-dalam-kebijakan-imo>.
- Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. (2017). Peran aktif Indonesia di organisasi maritim internasional dukung kemajuan maritim Indonesia. Diakses dari <https://hubla.dephub.go.id/home/post/read/4919/peran-aktif-indonesia-di-organisasi-maritim-internasional-dukung-kemajuan-maritim-indonesia>.
- Dirgantara, O. B., Tatit, E. W., & Suharto, D. (2020). **Efektivitas pelaksanaan operasi Trilateral Maritime Patrol Indomalphi dalam menjaga keamanan maritim di wilayah Laut Sulu**. *Jurnal Maritim Indonesia*, 8(1).
- Fakultas Hukum UMSU. (2024). Peran Indonesia dalam ASEAN di berbagai bidang. Diakses dari <https://fahum.umsu.ac.id/peran-indonesia-dalam-asean-di-berbagai-bidang/>.
- Fakultas Pertanian UGM. (2021). Indonesia sebagai poros maritim. Diakses dari <https://kmip.faperta.ugm.ac.id/indonesia-sebagai-poros-maritim/>.
- Hanggarini, P., Madjid, M. A., Perwita, A. A. B., & Wiranto, S. (2022). **Budaya maritim dan diplomasi maritim untuk kepentingan nasional**. *Indonesian Perspective*, 7(2), 164–179.

- Iswardhana, M. R. (2021). **Kerjasama maritim Indonesia-Amerika Serikat sebagai implementasi politik poros maritim Indonesia: BAKAMLA-US Coast Guard.** *Jurnal Dinamika Pemerintah*, 4(1).
- Kamaluddin Nashir, A. (2024). **Kepentingan dan posisi strategis Indonesia dalam peta geopolitik Indo-Pasifik.** *Intermestic: Journal of International Studies*, 8(2).
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2024). Indonesia-Timor Leste perkuat komitmen jaga keberlanjutan ekosistem laut. Diakses dari <https://kkp.go.id/djpt/indonesia-timor-leste-perkuat-komitmen-jaga-keberlanjutan-ekosistem-laut/detail.html>.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2016). Menuju poros maritim dunia. Diakses dari <https://www.kominfo.go.id/berita/artikel/detail/menuju-poros-maritim-dunia>.
- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. (2024). Kolaborasi inovatif komite bersama ke-7 Korea-Indonesia di bidang sains dan teknologi kelautan. Diakses dari <https://maritim.go.id/detail/kolaborasi-inovatif-komite-bersama-ke-7-korea-indonesia-di-bidang-sains-dan-teknologi-kelautan>.
- Kusumawardhana, I., Rosyidin, M., Ardiyanti, D., & Widodo, V. (2024). **Kebijakan luar negeri Indonesia di bawah pemerintahan Joko Widodo, ASEAN, poros maritim dunia, dan krisis Myanmar.** Penerbit Alinea.